



► KENAIKAN BBM

Penerima Bansos Terbanyak di Gunungkidul

Yosef Leon, Sunartono,
& Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Sebanyak 343.121 warga DIY bakal menerima bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jumlah penerima bansos masih dimungkinkan bertambah.

Dari 343.121 data penerima bansos BBM se-DIY, Gunungkidul menjadi penerima terbanyak dengan jumlah 95.799, disusul Bantul 88.106 penerima, Sleman 87.348, Kulonprogo 48.799, dan Kota Jogja sebanyak 23.069 penerima. (*selengkapnya lihat grafis*)

Rencananya titik penyaluran akan diperluas untuk mempercepat pencairan.

PT Pos siap menyalurkan bansos. Executive General Manager Kantor Cabang Utama Pos Jogja, Fahdian Hasibuan, mengatakan baru berkoordinasi dengan kabupaten dan kota di DIY untuk menentukan lokasi penyaluran bansos BBM.

Penerima Bansos...

"Tadi [kemarin] blurah akan diperluas guna mempercepat proses penyelesaian bansos keparu kami koordinasikan untuk menentukan titik-titik bayar bansos di mana saja. Sampai sekarang perintah bayarnya belum turun," kata Fahdian, Senin (5/9).

Menurut Fahdian, data itu masih berubah lantaran ada penerima yang diblokir akibat berbagai sebab. "Kemungkinan ada perubahan data penerima, meskipun jumlahnya sudah kami terima. Ini data bisa kurang atau bisa bertambah. Tapi besar kemungkinan bertambah," ujar dia.

Fahdian mengatakan bansos BBM akan disalurkan berbarengan dengan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). PT Pos masih menunggu data valid berkaitan dengan warga yang hanya menerima bansos BBM atau bansos BBM sekaligus BPNT. "Kami belum tahu berapa yang menerima bansos BBM, yang menerima bansos BBM plus BPNT satu bulan atau bansos BBM plus BPNT tiga bulan. Ini masih dikoordinasikan terus datanya karena belum final," ungkapnya.

Bansos dampak kenaikan harga BBM untuk warga Kota Jogja akan disalurkan di tiga kantor pos, tetapi ada kemungkinan bakal bertambah. Sementara di wilayah Sleman, bansos akan dikucurkan di kantor pos lantaran balai desa dinilai kurang representatif untuk mengadakan pembagian dengan jumlah warga yang cukup banyak. "Penyaluran tetap di kantor pos, tapi kami juga diskusikan apakah akan ditambah tempat penyalurannya supaya lebih dekat ke masyarakat," ucap dia.

Namun, secara umum PT Pos mengaku siap menyalurkan bansos BBM kepada masyarakat.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan daerah hanya mengoordinasi penyaluran bantuan langsung tunai serta mencegah terjadinya inflasi dengan memastikan kelancaran pasokan.

Uji Coba

Pemerintah Kota Jogja dilaporkan telah memulai uji coba penyaluran bansos BBM pada 3 September di kawasan Ngupasan. Sebanyak 50 dari 23.000 penerima menjadi sasaran dari uji coba penyaluran itu. Dana bansos akan dicairkan sebanyak dua kali.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja, Maryustion Tonang, mengatakan total ada 23.000 penerima yang mendapatkan bansos BBM di wilayahnya.

"Ada 50 penerima yang mendapat bantuan dan sesegera mungkin akan menyusul untuk penerima lainnya," kata Tion, Senin.

Pada kesempatan itu penyaluran dilakukan dari pintu ke pintu secara langsung ke alamat warga. Pihaknya masih berkoordinasi dengan PT Pos untuk menentukan skema penyaluran yang tepat bagi penerima yang belum.

Tion menjelaskan data warga penerima atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapat bansos BBM diperoleh dari data pemerintah pusat atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ke depan penyaluran bansos akan diterima bertahap oleh KPM. "Nanti dilakukan dua kali penyaluran dengan total bantuan senilai Rp600.000. Bantuan senilai Rp300.000 untuk periode September dan bantuan periode

kedua direncanakan disalurkan pada Desember," ujarnya.

Ia berharap bansos BBM tersebut dapat didistribusikan per kelurahan untuk memudahkan warga mengakses bantuan. "Dengan demikian, bantuan bisa diserahkan secara cepat dan bisa mengurangi potensi kerumunan karena penyaluran didistribusikan per wilayah," katanya.

Kurangi Penderitaan

Pengamat ekonomi Prof Edy Suandi Hamid mendesak pemerintah segera menyalurkan bansos untuk mengurangi penderitaan warga miskin terdampak kenaikan harga BBM.

"Kalau kompensasi tidak segera diberikan maka akan menambah penderitaan kaum miskin," katanya.

Hanya saja, ia menekankan agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran dan betul-betul diterima orang miskin. Oleh karenanya, ia meminta agar data penerima kompensasi BBM tersebut harus akurat, dan pengawasan yang ketat.

Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta itu mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (mencabut subsidi BBM) dinilai tepat. Alasannya selama ini, subsidi BBM banyak dinikmati golongan orang kaya.

"Bagi saya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM itu tepat," kata mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja itu.

Edy mengatakan bila memungkinkan, pemberian bantuan tersebut dilakukan tidak hanya sekali tetapi sampai dampak kenaikan harga BBM sudah tidak dirasakan warga miskin.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005